

Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Mewujudkan Perdamaian di Indonesia

oleh **Shelomita Selamat*** - Malang

Abstract

This essay deals with the issue of multiculturalism as a social reality and the need to implement a multicultural education to deepen the social knowledge of Indonesia and the Indonesians. The process of globalization has been invading almost all aspect of human life, which force ordinary Indonesians to come to terms with this global movement. The notion of diversity is very strong in Indonesia and eventually considered as an internal power to deal with the diversified society. However, not every Indonesian seems to understand and live this variety as a blessing. Many even consider it as a destructive factor. a lot of social unrests in Indonesia recently were actually caused by this lack of understanding. Therefore, the author suggests that a multicultural education is very crucial and urgently needed. The national constitution and other regulations are highlighted as the legal basis of the proposed education. Meanwhile, the implementation of this kind of education needs cooperation between all social elements in Indonesia.

Keywords: pendidikan multikultural, masyarakat majemuk, konflik, kesatuan, perdamaian.

1. Pengantar

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama, adat istiadat dan kebudayaan. Kemajemukan tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila masing-masing individu tidak memiliki pengertian yang benar tentang makna persatuan dan kesatuan suatu bangsa, kemajemukan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antar suku yang tentunya mengancam persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

Merupakan suatu kenyataan yang harus diterima bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pengertian yang benar tentang nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam konflik dan kerusuhan yang terjadi di negara kita. Sebut saja kerusuhan

* Penulis adalah mahasiswa Magister Filsafat pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Widya Sasana, Malang.

yang terjadi di Ambon, Poso, Sambas, Aceh dan berbagai macam daerah yang lain. Beberapa tahun yang lalu juga terjadi pembakaran tempat-tempat ibadah. Masih jelas pula dalam ingatan kita peristiwa yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998, di mana terjadi pembantaian terhadap etnis Tionghoa di beberapa tempat. Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut adalah tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Indonesia yang masih rendah, sehingga mereka mudah terpancing oleh berbagai macam bentuk provokasi yang disebar oleh pihak-pihak tertentu yang ingin merusak persatuan dan kesatuan yang sebelumnya telah terbina dengan baik.

Masalah-masalah tersebut harus segera diatasi agar tercipta kesatuan di negara kita sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, masyarakat perlu mendapat pemahaman yang benar berkaitan dengan kemajemukan yang ada dalam masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diterapkannya pendidikan multikultural pada anak-anak agar kelak mereka dapat menghargai berbagai perbedaan yang ada di sekitarnya.

Hal tersebut mendorong penulis untuk membahas mengenai perlunya pendidikan multikultural sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perdamaian di negara kita. Pada paper ini akan dibahas mengenai konsep multikulturalisme itu sendiri, realitas yang terjadi di negara kita belakangan ini dan perlunya diterapkan pendidikan multikultural sejak dini pada anak-anak.

2. Pluralisme Sebagai Unsur Multikulturalisme

Istilah multikulturalisme seringkali disamakan dengan istilah pluralisme. Padahal sebenarnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Pluralisme merupakan konsep yang biasanya digunakan untuk mengartikan keberagaman sosial atau stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat (bdk. Hefner, 2007: 411-412). Siti Ruhaini Djuhayatin (bdk. Hefner, ibid.) menyitir kata-kata Chopp (1986), menyatakan bahwa pluralisme menyangkut antara lain: keanekaragaman pandangan dunia, etnisitas, agama, peran, dan orang-orang di dalam suatu masyarakat. Pluralisme mengarah pada suatu kesadaran akan adanya pihak lain dan adanya perbedaan, baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan filosofis dengan representasinya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pluralisme merupakan keanekaragaman yang terdapat dalam suatu masyarakat majemuk, yang meliputi keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya.

Secara etimologis, multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti plural dan kulturalisme yang berarti budaya. Menurut Will Kymlicka, seorang

pakar filsafat dan studi kebudayaan dari Kanada, istilah multikultural mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda dan masing-masing memiliki integritas dan tantangannya sendiri-sendiri (bdk. Sudhiarsa, 2008:74). Profesor Parsudi Suparlan (2007), dalam artikelnya *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, menuliskan multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun kebudayaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa multikulturalisme merupakan suatu paham yang menekankan kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Dengan demikian istilah pluralisme dan multikulturalisme memiliki pengertian yang berbeda. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Dapat dikatakan bahwa pluralisme merupakan salah satu unsur dari multikulturalisme.

Rob Reich membedakan antara multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif (bdk. Tilaar, 2004:177). Multikulturalisme deskriptif menurutnya adalah kenyataan sosial yang oleh para pakar politik dikenal sebagai kenyataan pluralistik. Multikulturalisme deskriptif tidak mengakui adanya satu konsep tentang apa yang disebut sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik tergantung pada nilai pluralistik di dalam masyarakat atau sesuatu yang dianggap benar oleh suatu masyarakat. Sedangkan multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, dan mengandaikan adanya ikatan moral dari para anggotanya di dalam batas-batas negara-bangsa untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama. Multikulturalisme normatif merupakan suatu kritik sosial atau rekonstruksi sosial dalam membangun keinginan bersama pada suatu kelompok atau membangun suatu wadah di dalam pluralitas budaya yang ada di dalam komunitas tersebut (Tilaar, *ibid.*). Multikulturalisme normatif sangat relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang bercita-cita membangun persatuan dan kesatuan di atas kondisi masyarakat yang sangat plural.

3. Wajah Indonesia di Era Globalisasi

3.1. Pluralitas sebagai cermin masyarakat Indonesia

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa, etnis, kebudayaan, dan sebagainya. Kemajemukan ini merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa kita yang harus dipertahankan dan dipelihara.

Di Indonesia terdapat beribu-ribu pulau yang didiami oleh berbagai macam suku bangsa yang tentunya juga memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Berdasarkan penelitian etnologis diketahui bahwa ada sekitar 600 suku bangsa

yang mendiami Indonesia (Tilaar, 2004:114). Pada tahun 2000 juga pernah diadakan sensus untuk mengetahui jumlah penduduk dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Lima suku bangsa terbesar di Indonesia berdasarkan sensus tersebut adalah: Jawa, Sunda, Melayu, Madura dan Batak. Selain kelima suku tersebut, masih banyak suku-suku bangsa yang lain di negara kita, misalnya: Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, Banjar, Bali, Sasak, Nias, dan sebagainya. Setiap subetnis di Indonesia memiliki kebudayaannya sendiri. Kebudayaan tersebut tidak hanya berkembang dalam suatu daerah tertentu, melainkan tersebar ke seluruh daerah di Nusantara.

Pluralitas agama juga merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masuknya agama-agama besar di dunia. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan berbagai macam aliran kepercayaan lainnya.

3.2. Kesatuan di tengah kemajemukan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis. Di tengah keanekaragaman budaya yang tak terbilang jumlahnya, Indonesia memiliki satu semboyan, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. *Bhinneka Tunggal Ika* berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digagas oleh para pendiri bangsa kita yang sangat menyadari akan keanekaragaman dan kemajemukan yang terdapat di negara kita. Semboyan ini menunjukkan upaya para pendiri negara Indonesia untuk mempersatukan berbagai unsur bahasa, suku bangsa, agama dan budaya.

Salah satu prinsip nasionalisme adalah kesatuan. Tilaar mengutip perkataan Anthony D. Smith mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan dan identitas dari suatu populasi yang anggota-anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa yang potensial (Tilaar, 2004:108).

Nasionalisme Indonesia yang berdasarkan paham kebangsaan dicetuskan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Peristiwa ini menunjukkan suatu dinamika dalam masyarakat yang diikat oleh suatu cita-cita bersama membentuk Indonesia merdeka sebagai suatu *imagined community*.¹

¹ Menurut seorang pakar budaya Benedict Anderson, keanekaragaman yang terdapat di Indonesia merupakan kekuatan pengikat untuk membentuk suatu masyarakat yang dicita-citakan atau suatu "*imagined community*". *Imagined community* tersebut tak lain adalah suatu bangsa dan negara yang merdeka, yaitu negara Indonesia. Bdk. Tilaar (2004: 257-258).

3.3. Konflik yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa

Keaneka-ragaman dan kemajemukan budaya merupakan suatu kekayaan bagi suatu bangsa, tak terkecuali bagi bangsa kita. Akan tetapi hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai macam konflik dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sarat dengan nuansa SARA. Sebut saja kerusuhan yang terjadi di Ambon, Aceh, Poso, Sambas, Sampit, dan daerah-daerah yang lain.

Poso merupakan salah satu daerah yang terletak di Sulawesi Tengah. Selama ini tercatat tiga kali kerusuhan besar di Poso. Kerusuhan pertama terjadi pada tanggal 25-30 Desember 1998, kerusuhan kedua terjadi tanggal 16-19 April 2000, dan kerusuhan ketiga terjadi pada tanggal 23 Mei - 10 Juni 2000. Kerusuhan ini menyebabkan banyaknya korban jiwa yang meninggal dan terluka, rusaknya ribuan rumah, sarana umum dan juga tempat ibadah. Kerusuhan ini pada awalnya terjadi karena pertengkaran antara dua orang pemuda yang sedang mabuk. Pemuda yang satu beragama Islam, dan yang lain beragama Kristen. Perkelahian tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan mengakibatkan terjadinya perkelahian antar kelompok (Islam dan Kristen).

Kerusuhan yang terjadi di Ambon diawali oleh perkelahian antara sekelompok pemuda di daerah Batu Merah dan Mardika. Peristiwa ini diawali dengan pertengkaran antara Yopie (seorang sopir angkutan umum yang beragama Kristen) dengan Salim (seorang yang beragama Islam). Perkelahian ini lalu berkembang menjadi perkelahian antar agama (Kristen - Islam) dan etnis pendatang (Bugis, Buton dan Makassar) dengan penduduk Ambon asli.

Selain berbagai macam kerusuhan yang terjadi, masih banyak pula berbagai peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pembakaran gereja di berbagai tempat di Indonesia juga menunjukkan rendahnya rasa toleransi antar umat beragama. Salah satu hal yang menyebabkan peristiwa ini terjadi adalah sikap chauvinisme atau fanatik yang berlebih-lebihan. Banyak orang yang merasa bahwa agama dan etnisnya adalah yang terbaik dan memandang rendah mereka yang beragama lain. Akhir-akhir ini di negara kita juga berkembang berbagai macam organisasi keagamaan yang mengarah pada pembentukan negara berdasarkan agama tertentu. Salah satu contoh dari hal ini adalah dengan dikeluarkannya perda di beberapa daerah yang mengarah pada syariat Islam. Hal ini menunjukkan kurang adanya sikap kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan budaya. Berbagai macam aturan yang mungkin sesuai dengan hukum Islam tidaklah dapat diterapkan begitu saja kepada mereka yang bukan beragama Islam.

Hal-hal di atas menjadi permasalahan besar bagi bangsa Indonesia di jaman sekarang. Kesatuan dan persatuan yang selama ini terbina dengan baik menjadi terancam oleh karena beberapa golongan yang mengutamakan kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan mereka yang berasal dari golongan lain.

4. Pendidikan Multikultural Demi Terwujudnya Perdamaian di Indonesia

Berbagai konflik yang terjadi menunjukkan betapa rapuhnya konstruksi kebangsaan berbasis multikulturalisme di negeri kita (Mahfud, 2009). Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerima berbagai perbedaan yang ada dan menganggap golongannya sebagai yang terbaik. Melihat kenyataan seperti ini, maka gagasan mengenai pendidikan multikultural di negara kita mutlak diperlukan demi terciptanya suasana yang kondusif bagi setiap orang tanpa terkecuali.

4.1. Pendidikan multikultural secara umum

Pendidikan multikultural merupakan fenomena yang relatif baru di dalam dunia pendidikan (Tilaar, 2004:123). Dalam konferensi dunia yang diselenggarakan oleh UNESCO di Thailand pada tahun 1991, disebutkan bahwa pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama bagi setiap orang (*education for all*).

Ide pendidikan multikulturalisme akhirnya menjadi komitmen global sebagaimana yang direkomendasikan UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa (Rahmat, 2009). Beberapa pesan yang dimuat dalam rekomendasi tersebut antara lain:

1. Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain.
2. Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkuat perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat.
3. Pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.
4. Pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam

diri peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.

Choirul Mahfud menyitir pernyataan Hilda Fernandez menuliskan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan (bdk. Mahfud, 2009).

Sementara itu, Tilaar menyitir pernyataan James A. Banks menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set to believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (bdk. Tilaar, 2004:181).

Pupu Saeful Rahmat mengutip pernyataan Nieto (1992) menyebutkan bahwa pendidikan multibudaya bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis; yang memperhatikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia; yang penting bagi semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang memungkinkan murid bekerja bagi keadilan sosial; yang merupakan proses di mana pengajar dan murid bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu pendidikan yang kritis yang memberi perhatian pada bangun pengetahuan sosial dan membantu murid untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial (Rahmat, 2009).

4.2. Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia

Menurut Tilaar, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial dan kehidupan manusia dalam berbagai kaitannya dengan masalah kebudayaan. Oleh karena itu pendidikan dalam multikulturalisme merupakan suatu realitas sosial yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan di masa-masa mendatang (bdk. Tilaar, 2004:169).

UNESCO menganjurkan adanya pendekatan multikultural dalam dunia pendidikan kepada negara-negara yang warganya heterogen. Hal ini disemangati oleh antropolog Claude Levi-Strauss yang menyatakan bahwa keberagaman budaya ada di belakang, di depan dan di sekeliling kita. Satu-satunya kebutuhan

kita adalah bagaimana membuat semua keberagaman itu memberikan sumbangannya yang paling berharga bagi semua orang (Wahyono, 2006:17).

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Untuk mewujudkan cita-cita yang digagas oleh para pendiri negara kita, maka pendidikan multikulturalisme di negara kita perlu segera diterapkan. Indonesia perlu menciptakan suatu sistem pendidikan yang dapat mengembangkan adanya rasa toleran terhadap berbagai macam agama, bahasa, budaya, etnis, kelas sosial dan sebagainya. Pendidikan multikultural sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai keberadaban publik (toleransi, pluralisme dan inklusivisme) yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta untuk mempercepat terwujudnya konsolidasi demokrasi yang sedang kita perjuangkan.

Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai masalah sosial yang terjadi di negara kita disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat sehingga mereka sangat mudah terpengaruh oleh ajakan para provokator yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, sejak masih kecil seorang anak harus dididik untuk dapat menghargai berbagai perbedaan dan didorong untuk dapat mengenali dan melenyapkan kecurigaan serta diskriminasi yang telah ada. Seorang anak harus dididik untuk mengembangkan sikap saling hormat-menghormati terhadap sesamanya yang berasal dari suku, agama, bahasa dan budaya yang berbeda dengannya.

4.3. Dasar pendidikan multikultural di Indonesia

Melihat begitu banyaknya konflik yang terjadi di negara kita, maka pendidikan berbasis multikulturalisme sudah saatnya dijadikan sebagai paradigma baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut HAR Tilaar, ada empat acuan pokok untuk merumuskan pendidikan multikultural di Indonesia (lih. Tilaar, 2004:194-214):

1. **Undang-Undang Dasar 1945.** Cita-cita bangsa Indonesia secara jelas tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea empat, yaitu: untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan insan-insan yang cerdas. Insan-insan yang cerdas memiliki beberapa macam karakter, antara lain: cerdas pandai, energik-kreatif, responsif terhadap tuntutan masyarakat demokratis, berdaya guna, berakhlak mulia, dan mengetahui sopan santun. Pendidikan multikultural merupakan suatu sarana untuk pengembangan manusia cerdas. Pendidikan

multikultural dapat melahirkan generasi-generasi yang berpandangan luas, yang memiliki toleransi terhadap mereka yang berasal dari golongan lain.

2. **TAP MPR No. VII/ MPR/ 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.** Melihat segala macam konflik yang terjadi belakangan ini, dapat dikatakan bahwa kita telah kehilangan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini antara lain lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru dan sempit, penegakan hukum yang kurang optimal, kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap kemajemukan kehidupan bangsa, dan sebagainya. Ada enam bidang etika kehidupan yang perlu diperhatikan dalam kehidupan berbangsa. Keenam bidang tersebut adalah sebagai berikut: etika sosial-budaya, etika politik-pemerintahan, etika ekonomi-bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan dan etika lingkungan. Pendidikan multikultural merupakan wadah untuk mengembangkan etika kehidupan berbangsa. Dalam proses pendidikan multikultural, nilai-nilai etika diinternalisasikan dan disosialisasikan dengan menggunakan metode persuasif, komunikatif serta dialogis.
3. **TAP MPR No. VII/ MPR/ 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.** Visi Indonesia masa depan dirumuskan setelah mencermati kehidupan berbangsa pada era reformasi. Hal ini dirasa perlu karena saat ini kehidupan berbangsa seakan-akan kehilangan arah atau cita-cita yang hendak dicapai. Dalam usaha untuk mewujudkan visi ideal ditentukan adanya visi antara, dalam hal ini visi Indonesia 2020.² Menjelang tahun 2020, diperkirakan banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa kita. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa perlu sungguh-sungguh dibina agar tidak terjadi perpecahan yang dapat menghancurkan bangsa kita. Untuk mewujudkan visi ini, pendidikan multikultural merupakan sarana yang efektif dalam memupuk sikap toleran dalam diri seorang anak untuk dapat menghargai berbagai kemajemukan yang ada.
4. **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.** Sekalipun tidak secara jelas menyinggung mengenai pendidikan

2 Banyak negara menentukan tahun 2020 sebagai tahun pelaksanaan dari berbagai kesepakatan kerja sama internasional dan perubahan-perubahan global yang akan terjadi. Tahun 2020 merupakan titik sementara bagi banyak negara untuk mempersiapkan diri memasuki dunia yang baru, dunia yang mengglobal, tetapi juga dunia yang mengakui keberadaan identitas dari berbagai komunitas bangsa (Tilaar, 2004:194-214).

multikultural, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada beberapa pasal yang menyinggung sedikit mengenai kemungkinan dikembangkannya pendidikan multikultural. Misalnya dalam pasal 4 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

4.4. Pelaku pendidikan multikultural

Pendidikan multikultural menggunakan pendekatan dari bawah (*grass root*), yaitu partisipasi spontan dari komunitas-komunitas di dalam masyarakat sendiri untuk menumbuhkan rasa persatuan dalam menghargai perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat (Tilaar, 2004). Untuk mewujudkan pendidikan multikultural bukan hanya tugas dari pemerintah dan lembaga pendidikan semata-mata, melainkan dibutuhkan peran serta dari seluruh anggota masyarakat.

Berikut ini adalah mereka yang terlibat secara langsung untuk mewujudkan pendidikan multikultural:

1. **Keluarga.** Keluarga merupakan media pembelajaran yang paling efektif dalam proses internalisasi dan transformasi nilai serta sosialisasi dalam diri seorang anak. Seorang anak pertama-tama mendapat pendidikan dalam keluarganya. Di sini orang tua memiliki peranan yang sangat besar dalam menumbuhkan rasa simpati dan toleran dalam diri seorang anak terhadap berbagai perbedaan yang ada. Seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi kesederajatan dengan orang lain kelak akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dapat menghargai dan menghormati berbagai perbedaan yang ada di sekitarnya.
2. **Tenaga pengajar (guru).** Guru memiliki peranan yang besar dalam keberhasilan implementasi pendidikan multikultural. Pelaksanaan pendidikan multikultural hanya dapat berjalan dengan baik apabila guru tersebut adalah pemain dalam kehidupan yang multikultural. Oleh karena itu seorang guru perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai konsep multikulturalisme agar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada para peserta didik.
3. **Lembaga-lembaga pemerintah.** Peran pemerintah daerah adalah sebagai koordinator dan fasilitator untuk berkembangnya budaya yang beraneka ragam yang terdapat pada daerahnya masing-masing (Tilaar, 2004:223-224). Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjamin

kehidupan dan keamanan untuk tumbuh dan berkembangnya kebudayaan-kebudayaan yang ada. Sedangkan pemerintah pusat (dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) memiliki peranan dalam mengarahkan lahir dan berkembangnya kebudayaan nasional Indonesia yang tumbuh dari kebhinekaan budaya suku-suku bangsa di Indonesia (Tilaar, *ibid.*).

4. **Lembaga-lembaga pendidikan.** Pelaksanaan program-program pendidikan multikultural sangat tergantung juga kepada peran serta lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, universitas) bukan hanya sebagai pusat belajar dan mengajar dalam pengertian "*intellectual development*", melainkan harus merupakan pusat penghayatan dan pengembangan budaya, baik budaya lokal, budaya nasional, bahkan budaya global (Tilaar, *ibid.*). Dalam lembaga-lembaga pendidikan ini seorang murid diperkenalkan pada budaya yang dimiliki oleh keluarganya atau masyarakat.
5. **Para peserta didik.** Para peserta didik merupakan aset yang tak ternilai untuk mewujudkan visi bangsa dan negara. Apabila sejak kecil mereka dididik untuk menghargai perbedaan yang ada disekitarnya, maka kelak mereka juga akan dapat mengembangkan sikap toleransi kepada sesama disekitarnya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa usaha untuk mengembangkan pendidikan multikultural merupakan tugas dari semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebagai suatu komunitas yang majemuk, maka individu-individu yang berada dalam masyarakat perlu saling belajar satu sama lain demi terciptanya rasa toleransi dan penghargaan terhadap berbagai perbedaan yang ada.

4.5. Implementasi pendidikan multikultural di lembaga pendidikan

Penyusunan kurikulum pendidikan multikultural perlu dipertimbangkan dengan cermat agar sungguh-sungguh efektif dalam membina sikap toleran dalam diri seseorang terhadap mereka yang memiliki pandangan lain dengannya. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang dialami oleh negara kita belakangan ini.

Dalam implementasinya, ada empat prinsip yang perlu dipegang oleh paradigma pendidikan multikultural (Rahmat, 2009): (1) Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang mempresentasikan pandangan dan

perspektif banyak orang; (2) Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah; (3) Kurikulum yang dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda; (4) Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.

Pendidikan multikultural bukan berarti disusunnya mata pelajaran pendidikan multikultural secara khusus, melainkan diintegrasikan dengan berbagai kurikulum yang sudah ada yang memiliki perspektif multikultural. Ada beberapa kurikulum yang memiliki perspektif multikultural, misalnya saja: kewarganegaraan, PPKN, agama, sosiologi, antropologi, sejarah, kesenian dan bahasa. Pengembangan pendidikan multikultural dapat juga dilakukan melalui model pembelajaran yang lain, seperti melalui kelompok diskusi, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya (Rahmat, 2009).

4.6. Tantangan mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia

Sekalipun pendidikan multikultural merupakan sesuatu yang mutlak untuk segera diterapkan, namun untuk mengimplementasikannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Ada banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi jika ingin menerapkan pendidikan multikultural di negara kita. Setidaknya, ada dua hambatan besar yang harus dihadapi, yaitu menguatnya politik identitas dan makin kentatnya etnisitas.³ Politik identitas maupun etnisitas dimanipulasikan oleh negara dan agama, untuk menonjolkan identitas perbedaan, sehingga menghambat komunikasi antar budaya yang seharusnya berada dalam relasi kesetaraan dan ketersalingan.

Indonesia adalah bangsa yang heterogen yang terdiri dari berbagai etnis, agama dan kebudayaan. Akan tetapi, tidak semua pihak dapat menerima keragaman ini sebagai suatu kekayaan bangsa yang tak ternilai. Kenyataan yang terjadi, ada pihak-pihak yang memaksa membentuk suatu masyarakat yang homogen, dengan dalih demi persatuan dan kesatuan atau demi mitos mayoritas sebagaimana yang dilakukan oleh kuasa negara dan agama. Pihak-

3 Sugeng Bayu Wahyono (2006:17-18) dalam artikel *Prospek Pendidikan Multikultural di Indonesia* menyitir kata-kata Agnes Heller (1995), menyatakan bahwa politik identitas adalah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama.

pihak ini berupaya melakukan penyeragaman yang anti keanekaragaman, anti lokalitas dan juga berarti anti demokrasi (Wahyono, 2006:22).

Selain hal tersebut, masih banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural. Standarisasi-standarisasi tunggal yang diciptakan oleh birokrasi pendidikan nasional adalah salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi. Pendidikan multikultural sama tidak mengenal standarisasi, karena pendidikan ini justru dilaksanakan untuk menolak dominasi tatanan tertentu dan ingin mewujudkan suatu tatanan yang adil.

Implikasi berbagai produk hukum pendidikan nasional juga menjadi hambatan besar bagi pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia (Darmaningtyas, 2006:98). Misalnya saja UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan, yang di dalamnya ditekankan pentingnya standarisasi tunggal pendidikan nasional dengan dalih untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Hal tersebut berlawanan dengan konsep pendidikan multikultural itu sendiri. Keputusan-Keputusan Menteri Pendidikan Nasional mengenai ujian nasional maupun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan juga sangat berlawanan dengan konsep pendidikan multikultural.

Hambatan lain yang harus dihadapi berasal dari keluarga dan guru (Faqih, 2009). Seorang anak mendapat pendidikan untuk pertama kalinya dalam keluarga. Di sini, orang tua memiliki peranan yang besar untuk menanamkan nilai multikulturali dalam diri anak-anaknya. Akan tetapi, seringkali orang tua merasa khawatir terhadap penerapan ide pendidikan multikultural, apalagi yang berhubungan dengan pluralisme agama.

Guru juga memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi pendidikan multikultural. Guru perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai konsep multikulturalisme agar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada murid-muridnya.

Menyusun kurikulum pendidikan multikultural bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan agar kurikulum tersebut sungguh-sungguh efektif dalam menumbuhkan semangat multikultural dalam diri seorang anak. Pendidikan multikultural bukan berarti disusunnya mata pelajaran pendidikan multikultural secara khusus, melainkan diintegrasikan dengan mata pelajaran lain yang sudah ada. Pendidikan bahasa daerah adalah salah satu pelajaran yang menurut beberapa pihak berlawanan dengan semangat multikultural. Kedudukan bahasa daerah sendiri tidak pernah jelas dalam

pendidikan di sekolah-sekolah. Kedudukan bahasa daerah cenderung dipertahankan sebagai bahasa intim yang bersifat *entre nous* dalam suatu kelompok etnis (Kleden, 1987:219).

5. Simpulan.

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita luhur sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Namun, mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, bahasa dan budaya, mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah. Kemajemukan tersebut seringkali menimbulkan konflik-konflik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan multikultural mutlak diperlukan dalam sistem pendidikan di negara kita. Para generasi muda selaku tonggak sejarah yang akan menentukan perkembangan bangsa perlu mendapatkan pendidikan multikultural sejak dini agar kelak dapat menerima dan menghargai sesamanya yang berbeda suku, agama dan budaya. Apabila hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan di negara kita. Dengan demikian, perdamaian yang selama ini dicita-citakan akan terwujud dengan sendirinya melalui sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

* * * * *

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, Ade, dkk. (2001), *Kabar dari Poso - Menggagas Jurnalisme Damai*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) / The British Council.
- Darmaningtyas (2006), "Quo Vadis Pendidikan Multikultural di Indonesia", dalam Y. Sari Jatmiko & A. Ferry T. Indratno (eds.), *Pendidikan Multikultural yang Berkeadilan Sosial*, Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar.
- Faqih, Abdullah, "Pendidikan Multikulturalisme dan Keadaban Demokrasi", <http://multiply.com>. Tanggal akses: 22 Mei 2009.
- Hefner, Robert W. (ed.) (2007), *Politik Multikulturalisme – Menggugat Realitas Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius / Impulse.

- Jatmiko, Y. Sari & A. Ferry T. Indratno (eds.) (2006), *Pendidikan Multikultural yang Berkeadilan Sosial*, Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar (DED) / Misereor.
- Kleden, Ignas (1987), *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Mahfud, Choirul, "Memahami Cakrawala Pendidikan Multikultural", http://pmiikomfaksyahum.wordpress.com/2007/07/28/memahami_cakrawala_pendidikan-multikultural. Tanggal akses: 1 Mei 2009.
- Rahmat, Pupu Saeful, "Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia (Sebuah Kajian terhadap Masalah-Masalah Sosial Dewasa Ini)", <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-indonesia>. Tanggal akses: 1 Mei 2009.
- Suaedy, Ahmad (ed.) (2000), *Luka Maluku: Militer Terlibat*, Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
- Sudhiarsa, Raymundus, SVD (ed.) (2008), *Kearifan Sosial Lintas Budaya – SVD Surya Wacana Merespon Misi Gereja*, Yogyakarta: Lamalera.
- Suparlan, Parsudi, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmddd/artikel_ps.htm. Tanggal akses: 28 Juli 2007.
- Tilaar, HAR (1999), *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia – Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, HAR (2004), *Multikulturalisme (Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wahyono, Sugeng Bayu (2006), "Prospek Pendidikan Multikultural di Indonesia", dalam Y. Sari Jatmiko & A. Ferry T. Indratno (eds.), *Pendidikan Multikultural yang Berkeadilan Sosial*, Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar.